

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. & Uhbiyati, N., *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S., 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hakim, S.A. & Suparlan, S., 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani.
- Hanafiah dan Suhana. 2012. *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Relika Aditama.
- Kurniasih, I & Sani, B., 2016. *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru* (Kata Pena).
- Kusana, W.S., 2012. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lestari, Tia., dkk. 2013. *Pengaruh Model Pembelajaran Word Square Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas III SD*.<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/viewFile/7689/5241>. Diunduh tanggal 30 September 2017 pukul 13.42
- Salamah, U. Suratman, Munir., 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Madai.
- Sardiman., 2009. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, S., 2015. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudijono, A., 2015. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A., 2012. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Swaprana, Ngurah Agung. 2016. *Penerapan Model Pembelajaran Word Square Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V*.<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/download/7782/5313>. Diunduh tanggal 30 September 2017 pukul 13.21
- Tampubolon, S.M., 2014. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Erlangga.
- U. S, Supardi. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Jakarta: Change Publication

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wahab, A, Abdul. & Sapriya., 2011. *Teori Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: ALFABETA

Wahyuni, T, Febri., 2017. *Efektivitas Model Pembelajaran Word Square Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep PKn Siswa Kelas V,*”. Universitas PGRI.
<http://prosiding.upgris.ac.id/index.php/PGSD17/PGSD2017/paper/viewFile/2459/2590>. Diunduh tanggal 9 Desember 2017.

LAMPIRAN

DATA SEKOLAH PENELITIAN

- Nama Sekolah : SDN Cilember 01
- Alamat : Kampung Babakan Rt. 03 Rw. 01 Desa Cilember
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
- Kepala Sekolah : Neneng Nengsih, M.Pd
- Akreditasi : A
- Visi : "Terselenggaranya layanan pendidikan yang profesional untuk membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah, terampil, cerdas, mandiri, berbudaya dan berwawasan global"
- Misi : Terdapat lima misi, sebagai berikut.
- a. Melaksanakan proses pendidikan yang menitik beratkan terhadap sikap baik spiritual atau sosial.
 - b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan keterampilan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki.
 - c. Memfasilitasi peserta didik untuk mengeksport pengetahuan melalui proses pembelajaran yang berkualitas.
 - d. Membentuk peserta didik yang mencintai budaya lokal dengan wawasan global melalui program pengembangan diri dan pembiasaan.
 - e. Membentuk peserta didik yang mandiri dan mampu bersaing, baik dalam bidang akademik dan nonakademik.
- Tujuan : Terdapat lima tujuan, sebagai berikut.
- Terbentuknya peserta didik yang berakhlakul karimah dan berjiwa sosial tinggi melalui pembiasaan yang terintegrasi baik dalam proses belajar mengajar atau diluar proses belajar mengajar.

SILABUS PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaran (PKn)
Kelas / Semester : V / 1
STANDAR KOMPETENSI : 2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok dan Uraian Materi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Gagasan Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber/ Bahan/ Alat
					Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
2.1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian perundang-undangan ▪ Fungsi / pentingnya peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghargai, Prestasi ▪ Bersahabat / Komunikatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi macam-macam peraturan di rumah dan di sekolah. ▪ Menjelaskan pengertian perundang-undangan. ▪ Mendiskusikan perbedaan fungsi peraturan tingkat pusat dan tingkat daerah. ▪ Mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diatur dengan undang-undang. ▪ Menjelaskan sebab beberapa hal perlu diatur dengan undang-undang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan pengertian perundang-undangan pusat dan daerah. ▪ Memahami perbedaan fungsi tiap peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah. ▪ Mengetahui berbagai hal yang perlu diatur dengan undang-undang. ▪ Memahami sebab dan asas pembuatan undang-undang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tugas individu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian tertulis (kemampuan analitis). ▪ Penilaian unjuk kerja (keberanian anak bercerita) ▪ Penilaian tertulis (kemampuan analitis). ▪ Penilaian unjuk kerja (keberanian anak menjelaskan pemikirannya) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengapa perlu dibuat peraturan perundang-undangan? ▪ Mengapa hak asasi manusia perlu diatur berdasarkan undang-undang? 	4 JP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V, Setiati Widiastuti, dkk., BSE., hlm. 25-35. ▪ Berbagai peraturan di sekolah. ▪ Berbagai peraturan di rumah.
2.2. Memberikan contoh peraturan perundang-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata urutan peraturan perundang-undangan di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cinta Damai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membaca informasi dan menjelaskan UUD 1945. ▪ Membaca informasi dan menjelaskan undang- 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui tata urutan perundang-undangan di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tugas kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian tertulis (kemampuan analitis). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UUD 1945 merupakan peraturan yang terdapat 	4 JP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku PKn. hlm. 36-43. ▪ Teks UUD 1945.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok dan Uraian Materi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa	Gagasan Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber/ Bahan/ Alat
					Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas, dan larangan merokok.	Indonesia.		undang atau peraturan pengganti undang-undang. <ul style="list-style-type: none"> Membaca informasi dan menjelaskan Peraturan Pemerintah. Membaca informasi dan menjelaskan Peraturan Presiden. Membaca informasi dan menjelaskan Peraturan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami kandungan dan fungsi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan hierarkinya. 		* Penilaian unjuk kerja (keberanian anak menjelaskan pemikirannya)	pada tataran ... dan berfungsi sebagai ... (dan lain-lain)		<ul style="list-style-type: none"> Teks Undang-Undang atau PerPU Teks Peraturan Pemerintah. Teks Peraturan Presiden. Teks Peraturan Daerah.
	<ul style="list-style-type: none"> Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Cinta Damai 	<ul style="list-style-type: none"> Membaca berbagai contoh peraturan. Menjelaskan sebab masyarakat harus mematuhi, serta akibat yang akan terjadi jika masyarakat melanggarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui akibat mematuhi/ Melanggar peraturan dan undang-undang bagi individu dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Tugas individu. 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian tertulis (kemampuan analitis). Penilaian unjuk kerja . 	<ul style="list-style-type: none"> Apa akibat melanggar peraturan daerah yang berisi larangan merokok di tempat umum? 		

Mengetahui,
Kepala SDN Cilember 01

Neneng Nengsih, M.Pd.
NIP. 196904071992032005

Cisarua, Juli 2018
Guru Kelas V

Yusup, S.Pd.SD
NUPTK.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SD Negeri Cilember 01
Kelas/Semester : V/I
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Hari, Tanggal Pelaksanaan : Sabtu, 10 November 2018
Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran x 35 menit (105 menit)

A. Standar Kompetensi

7. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

B. Kompetensi Dasar

7.4 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

C. Indikator

7.4.1 Siswa dapat mengetahui pengertian undang-undang

D. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengetahui dan menyebutkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tingkat pusat, dan daerah
2. Siswa dapat menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Karakter yang Hendak dicapai

1. Rasa ingin tahu
2. Kerja sama
3. Ketelitian
4. Mandiri

F. Materi Pelajaran

1. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Pentingnya Peraturan perundang-undangan yaitu untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah. Peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

a. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

b. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.

c. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

d. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

G. Model dan Metode Pembelajaran

Model : Pembelajaran *Word Square*

Metode : Ceramah, diskusi, penugasan dan Tanya Jawab

H. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran		Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. • Guru mengecek kesiapan diri dengan melakukan presensi kehadiran siswa dan bertanya mengenai kabar siswa. • Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari : 1. “apakah sudah ada yang tahu, apa yang di maksud peraturan?” • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 	10 Menit
Kegiatan Inti		85 menit
Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menjelaskan materi tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah 	
kelompok-kelompok belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. 	
Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesudah guru memberikan semua pelajaran yang sudah diajarkan siswa langsung di berikan soal sesuai dengan pelajaran. 	
Membimbing kelompok-kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan selebar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut mengerjakan soal yang telah diberikan guru. 	
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya didepan kelas. 	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini. • Mengakhiri pembelajaran dengan membaca do'a • Mengucapkan salam pada siswa 	10 menit

I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran

1. Media Pembelajaran :
2. Alat Pembelajaran :
 - Papan tulis
 - Spidol
 - Penghapus papan tulis
3. Sumber Pembelajaran :
 - Buku Paket PKn kelas V

J. Penilaian

1. Penilaian Awal : -
2. Penilaian Proses :
 - a. Lisan : Tanya jawab

U	W	K	U	T	A	I	S	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tulisan : Penilaiann kerjasama kelompok

3. Penilaian Akhir : -

Bogor, 10 November 2018

Peneliti,

Guru Kelas V,

Eka Rizky Septiaji
NIM. H. 1410157

Yusup, S.Sos., S.Pd.SD
NUPTK.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Neneng Nengsih, M.Pd
NIP. 196904071992032005

LEMBAR KERJA KELOMPOK

NAMA KELOMPOK :

ANGGOTA KELOMPOK :

U	R	O	B	S	P	S	I	A
D	A	R	E	B	P	L	N	D
1	B	U	L	I	K	A	G	U
9	I	P	D	G	I	M	O	R
4	F	S	H	U	K	U	M	A
5	T	I	S	N	T	A	S	I
P	R	E	S	I	D	E	N	P

PERTANYAAN

1. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh.....
2. Orang yang memperkaya diri dengan cara melanggar hukum disebut...
3. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah....
4. Dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum karena Indonesia adalah negara
5. Peraturan Presiden dibuat oleh...

KUNCI JAWABAN

- 1) PPKI
- 2) KORUPSI
- 3) UUD 1945
- 4) HUKUM
- 5) PRESIDEN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SD Negeri Cilember 01
 Kelas/Semester : V/I
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Hari, Tanggal Pelaksanaan : Senin, 12 November 2018
 Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran x 35 menit (105 menit)

B. Standar Kompetensi

1. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

B. Kompetensi Dasar

- 1.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

C. Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan pentingnya perundang-undangan

D. Tujuan Pembelajaran

3. Siswa dapat mengetahui dan menyebutkan perbedaan fungsi tiap peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah

E. Karakter yang Hendak dicapai

5. Rasa ingin tahu
6. Kerja sama
7. Ketelitian
8. Mandiri

F. Materi Pelajaran

3. Pentingnya Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 Peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Pentingnya Peraturan perundang-undangan yaitu untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat.

4. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah. Peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

a. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

b. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.

c. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

2. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan

- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

G. Model dan Metode Pembelajaran

Model : Pembelajaran *Word Square*

Metode : Ceramah, diskusi, penugasan dan Tanya Jawab

H. Kegiatan Pembelajaran

	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. • Guru mengecek kesiapan diri dengan melakukan presensi kehadiran siswa dan bertanya mengenai kabar siswa. • Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari : 2. Apa pentingnya perundang-undangan?" • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 	10 Menit
Kegiatan Inti		85 menit
Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menjelaskan materi tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah dan pentingnya undang-undang 	
kelompok-kelompok belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. 	
Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesudah guru memberikan semua pelajaran yang sudah diajarkan siswa langsung di berikan soal sesuai dengan pelajaran. 	
Membimbing kelompok-kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan selebar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut mengerjakan soal yang telah diberikan guru. 	
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya didepan kelas. 	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini. 	10 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri pembelajaran dengan membaca do'a • Mengucapkan salam pada siswa 	
--	---	--

I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran

2. Media Pembelajaran :
3. Alat Pembelajaran :
 - Papan tulis
 - Spidol
 - Penghapus papan tulis
4. Sumber Pembelajaran :
 - Buku Paket PKn kelas V

J. Penilaian

1. Penilaian Awal : -
2. Penilaian Proses :
 - a. Lisan : Tanya jawab
 - b. Tulisan : Penilaiann kerjasama kelompok
3. Penilaian Akhir : -

Bogor, 12 November 2018

Peneliti,

Guru Kelas V,

Eka Rizky Septiaji
NIM. H. 1410157

Yusup, S.Sos., S.Pd.SD
NUPTK.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Neneng Nengsih, M.Pd
NIP. 196904071992032005

LEMBAR KERJA KELOMPOK

NAMA KELOMPOK :

ANGGOTA KELOMPOK :

U	W	K	U	T	A	K	P	K
U	R	O	B	S	P	S	I	A
D	A	R	E	B	P	L	N	D
1	B	U	L	I	K	A	G	U
9	I	P	D	G	I	M	O	R
4	F	S	H	U	K	U	M	A
5	T	I	S	N	T	A	S	I
P	R	I	S	I	D	E	N	P

PERTANYAAN

6. Negara indonesia adalah negara.....
7. Peraturan Daerah kepanjangan dari...
8. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah....
9. Peraturan Presiden dibuat oleh...
10. Komisi Pemberantasan Korupsi kepanjangan...

KUNCI JAWABAN

- 1) HUKUM
- 2) PERDA
- 3) UUD 1945
- 4) PRESIDEN
- 5) KPK

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SD Negeri Cilember 01
 Kelas/Semester : V/I
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Hari, Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 13 November 2018
 Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran x 35 menit (105 menit)

C. Standar Kompetensi

2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

B. Kompetensi Dasar

- 2.1 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas, dan larangan merokok

C. Indikator

1. Siswa dapat mengetahui contoh-contoh peraturan pemerintah pusat dan daerah

D. Tujuan Pembelajaran

4. Siswa dapat mengetahui dan dapat menyebutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia
5. Memahami dan dapat menjelaskan kandungan dan fungsi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

E. Karakter yang Hendak dicapai

9. Rasa ingin tahu
10. Kerja sama
11. Ketelitian
12. Mandiri

F. Materi Pelajaran

5. Pentingnya Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 Peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Pentingnya Peraturan perundang-undangan yaitu untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata

pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat.

6. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah. Peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

3. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

4. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

6. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

7. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
8. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan

9. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

G. Model dan Metode Pembelajaran

Model : Pembelajaran *Word Square*

Metode : Ceramah, diskusi, penugasan dan Tanya Jawab

H. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran		Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. • Guru mengecek kesiapan diri dengan melakukan presensi kehadiran siswa dan bertanya mengenai kabar siswa. • Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari : 3. Apa pentingnya perundang-undangan?" • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 	10 Menit
Kegiatan Inti		85 menit
Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menjelaskan materi tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah dan pentingnya undang-undang 	
kelompok-kelompok belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. 	
Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesudah guru memberikan semua pelajaran yang sudah diajarkan siswa langsung di berikan soal sesuai dengan pelajaran. 	
Membimbing kelompok-kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan selebaran kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut mengerjakan soal yang telah diberikan guru. 	
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya didepan kelas. 	

Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini. • Mengakhiri pembelajaran dengan membaca do'a • Mengucapkan salam pada siswa 	10 menit
-------------------------	---	----------

I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran

10. Media Pembelajaran :

11. Alat Pembelajaran :

- Papan tulis
- Spidol
- Penghapus papan tulis

12. Sumber Pembelajaran :

- Buku Paket PKn kelas V

J. Penilaian

1. Penilaian Awal : -

2. Penilaian Proses :

a. Lisan : Tanya jawab

b. Tulisan : Penilaiann kerjasama kelompok

3. Penilaian Akhir : -

Bogor, 13 November 2018

Peneliti,

Guru Kelas V,

Eka Rizky Septiaji
NIM. H. 1410157

Yusup, S.Sos., S.Pd.SD
NUPTK.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Neneng Nengsih, M.Pd
NIP. 196904071992032005

LEMBAR KERJA KELOMPOK

NAMA KELOMPOK :

ANGGOTA KELOMPOK :

U	W	K	U	T	A	K	P	K
U	R	O	B	S	P	S	I	A
D	A	R	E	B	P	L	N	D
1	B	U	L	I	K	A	G	U
9	I	P	D	G	I	M	O	R
4	F	S	H	U	K	U	M	A
5	T	I	S	N	T	A	S	I
P	R	I	S	I	D	E	N	P

PERTANYAAN

1. Negara indonesia adalah negara.....
2. Peraturan Daerah kepanjangan dari...
3. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah....
4. Peraturan Presiden dibuat oleh...
5. Komisi Pemberantasan Korupsi kepanjangan...

KUNCI JAWABAN

- 1) HUKUM
- 2) PERDA
- 3) UUD 1945
- 4) PRESIDEN
- 5) KPK

**LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN WORD SQUARE**

N0.	Kegiatan	Terlaksana		Penilaian			
		Ya	Tidak	1	2	3	4
1.	Pendahuluan						
	guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing	√				√	
	Guru mengecek kesiapan diri dengan melakukan presensi kehadiran siswa dan bertanya mengenai kabar siswa	√					√
	guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan di pelajari	√				√	
	Menyampaikan tujuan pembelajaran	√				√	
2	Inti						
	Guru menyampaikan materi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	√					√
	Guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang.	√				√	
	Sesudah guru memberikan semua pelajaran yang sudah diajarkan siswa langsung di berikan soal sesuai dengan pelajaran.	√				√	
	Memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut mengerjakan soal yang telah diberikan guru.	√				√	
3	Penutup						
	Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini.	√					√
	Mengakhiri pembelajaran dengan membaca do'a	√				√	
	Mengucapkan salam pada siswa	√				√	

Kriteria :

- 1 = tidak baik
- 2 = cukup baik
- 3 = baik
- 4 = sangat baik

Pengamat,

Yusup, S.Sos., S.Pd.SD

LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN WORD SQUARE

NO.	Kegiatan	Terlaksana		Penilaian			
		Ya	Tidak	1	2	3	4
1.	Pendahuluan						
	guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing	√				√	
	Guru mengecek kesiapan diri dengan melakukan presensi kehadiran siswa dan bertanya mengenai kabar siswa	√					√
	guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan di pelajari	√				√	
	Menyampaikan tujuan pembelajaran						√
2	Inti						
	Guru menyampaikan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	√				√	
	Guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang.	√				√	
	Sesudah guru memberikan semua pelajaran yang sudah diajarkan siswa langsung di berikan soal sesuai dengan pelajaran.	√				√	
	Memberikan selebar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut mengerjakan soal yang telah diberikan guru.	√				√	
3	Penutup						
	Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini.	√				√	
	Mengakhiri pembelajaran dengan membaca do'a	√				√	
	Mengucapkan salam pada siswa	√				√	

Kriteria :

- 1 = tidak baik
- 2 = cukup baik
- 3 = baik
- 4 = sangat baik

Pengamat,

Yusup, S.Sos., S.Pd.SD

LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN WORD SQUARE

NO.	Kegiatan	Terlaksana		Penilaian			
		Ya	Tidak	1	2	3	4
1.	Pendahuluan						
	guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing	√				√	
	Guru mengecek kesiapan diri dengan melakukan presensi kehadiran siswa dan bertanya mengenai kabar siswa	√					√
	guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan di pelajari	√				√	
	Menyampaikan tujuan pembelajaran	√				√	
2	Inti						
	Guru menyampaikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas.	√				√	
	Guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang.	√					√
	Sesudah guru memberikan semua pelajaran yang sudah diajarkan siswa langsung di berikan soal sesuai dengan pelajaran.	√					√
	Memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut mengerjakan soal yang telah diberikan guru.	√				√	
3	Penutup						
	Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini.	√				√	
	Mengakhiri pembelajaran dengan membaca do'a	√				√	
	Mengucapkan salam pada siswa	√				√	

Kriteria :

- 1 = tidak baik
- 2 = cukup baik
- 3 = baik
- 4 = sangat baik

Pengamat,

Yusup, S.Sos., S.Pd.SD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SDN Cilember 01
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Kelas / Semester : V / I
 Hari / Tanggal : Kamis, 1 November 2018
 Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

1. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

B. Kompetensi Dasar

- 1.1 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas, dan larangan merokok

C. Indikator

1. Siswa dapat mengetahui contoh-contoh peraturan pemerintah pusat dan daerah

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran siswa dapat:

1. Mengetahui dan dapat menyebutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia
2. Memahami dan dapat menjelaskan kandungan dan fungsi peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia

E. Karakter Bangsa

1. Demokratis
2. Rasa ingin tahu

F. Materi Pembelajaran

a. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah. Peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

b. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.

d. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.\

e. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

f. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;

g. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan

h. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

G. Metode Pembelajaran

1. Diskusi
2. Tanya jawab
3. Penugasan

H. Sumber, Alat dan Bahan Pembelajaran

1. Sumber Pembelajaran:

- a. Buku Paket PKn

2. Alat dan Bahan Pembelajaran:

- a. Kartu nama-nama peraturan
- b. Gambar Rambu-rambu Lalu lintas

I. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (5 menit)

- a. Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama, presensi, apersepsi dan kepercayaan masing-masing, untuk mengawali pelajaran.
- b. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran
- c. Guru dan siswa bertanya jawab tentang fungsi peta dunia.

2. Kegiatan Inti (90 menit)

a. Eksplorasi

Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang tata urutan perundang undangan yang berlaku di Indonesia

b. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

- 1) Guru menjelaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar
- 3) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok
- 4) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:

- 1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
- 2) Bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman
- 3) Memberikan penguatan dan penyimpulan

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

Dalam kegiatan penutup, guru:

- a. Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari

b. Guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.

c. Memberikan tes akhir

I. Penilaian

A. Prosedur Penilaian

1. Penilaian Awal : -
2. Penilaian Proses : -
3. Penilaian Akhir : Ada

B. Teknik, Bentuk dan Instrumen

1. Teknik Penilaian
 - a. Penilaian Awal : Tanya jawab
 - b. Penilaian Proses : -
 - c. Penilaian Akhir : Tes tertulis
2. Bentuk Instrumen
 - a. Penilaian Awal : Tes lisan
 - b. Penilaian Proses : -
 - c. Penilaian Akhir : Tes tertulis

Bogor, 1 November 2018

Peneliti,

Guru Kelas V,

Eka Rizky Septiaji
NIM. H. 1410157

Veri Frima Kuswaya, S.Pd.SD
NUPTK.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Neneng Nengsih, M.Pd
NIP. 196904071992032005

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SDN Cilember 01
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Kelas / Semester : V / I
 Hari / Tanggal : Jumat, 2 November 2018
 Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

1. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

B. Kompetensi Dasar

- 1.1 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas, dan larangan merokok

C. Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pajak, korupsi, dan lalu lintas

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran siswa dapat:

1. Mengetahui dan dapat menyebutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia
2. Memahami dan dapat menjelaskan kandungan dan fungsi peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia

E. Karakter Bangsa

1. Demokratis
2. Rasa ingin tahu

F. Materi Pembelajaran

1. Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - a. Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi
 Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk pemberantasan tindak korupsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab I pasal 3 : “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Tujuan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana

b. Peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika

Tahukah kamu tentang narkotika? Narkotika atau narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika telah banyak merusak masa depan anak bangsa. Persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Lewat narkotika inilah masa depan bangsa dihancurkan, yaitu melalui generasi mudanya. Jika generasi muda sudah menjadi pecandu narkoba, maka masa depan bangsa akan suram. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana bagi penanam, penjual, maupun pemakai dengan ancaman pidana. Hal ini tampak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab XII, pasal 78 sampai 99.

c. Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya yang sampai menimbulkan korban adalah karena pelanggaran terhadap lalu lintas. Ada yang tidak memakai helm, kecepatan yang terlalu tinggi, dan lain-lain. Semua ini merupakan bentuk pelanggaran yang dapat berakibat buruk bagi pengendara. Jika Undang-Undang yang sudah dibuat dipatuhi, maka akan tercipta suasana yang baik. Namun terkadang masih banyak yang melanggar undang-undang yang dibuat. Maka akibatnya adalah terjadi musibah yang tidak diinginkan.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah. Peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

a. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan

perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

- b. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.
- d. Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
 - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

G. Metode Pembelajaran

1. Diskusi

2. Tanya jawab

3. Penugasan

H. Sumber, Alat dan Bahan Pembelajaran

1. Sumber Pembelajaran:

a. Buku Paket PKn

2. Alat dan Bahan Pembelajaran:

a. Kartu nama-nama peraturan

b. Gambar Rambu-rambu Lalu lintas

I. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (5 menit)

a. Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama, presensi, apersepsi dan kepercayaan masing-masing, untuk mengawali pelajaran.

b. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran

c. Guru dan siswa bertanya jawab tentang fungsi peta dunia.

2. Kegiatan Inti (90 menit)

a. Eksplorasi

Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang tata urutan perundang undangan yang berlaku di Indonesia

b. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

1) Guru menjelaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar

3) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok

4) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:

1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

2) Bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman

3) Memberikan penguatan dan penyimpulan

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

Dalam kegiatan penutup, guru:

- a. Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
- b. Guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.
- c. Memberikan tes akhir

I. Penilaian

A. Prosedur Penilaian

1. Penilaian Awal : -
2. Penilaian Proses : -
3. Penilaian Akhir : Ada

B. Teknik, Bentuk dan Instrumen

1. Teknik Penilaian
 - a. Penilaian Awal : Tanya jawab
 - b. Penilaian Proses : -
 - c. Penilaian Akhir : Tes tertulis
2. Bentuk Instrumen
 - a. Penilaian Awal : Tes lisan
 - b. Penilaian Proses : -
 - c. Penilaian Akhir : Tes tertulis

Bogor, 2 November 2018

Peneliti,

Guru Kelas V,

Eka Rizky Septiaji
NIM. H. 1410157

Veri Frima Kuswaya, S.Pd.SD
NUPTK.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Neneng Nengsih, M.Pd
NIP. 196904071992032005

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SDN Cilember 01
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Kelas / Semester : V / I
 Hari / Tanggal : Sabtu, 3 November 2018
 Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

B. Kompetensi Dasar

- 2.1 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas, dan larangan merokok

C. Indikator

2. Siswa dapat mengetahui kerugian korupsi dan merokok

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran siswa dapat:

3. Mengetahui dan dapat menyebutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia
4. Memahami dan dapat menjelaskan kandungan dan fungsi peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia

E. Karakter Bangsa

1. Demokratis
2. Rasa ingin tahu

F. Materi Pembelajaran

- Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

a. Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk pemberantasan tindak korupsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab I pasal 3 : "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun." Tujuan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana

b. Peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika

Tahukah kamu tentang narkotika? Narkotika atau narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika telah banyak merusak masa depan anak bangsa. Persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa

Indonesia. Lewat narkoba inilah masa depan bangsa dihancurkan, yaitu melalui generasi mudanya. Jika generasi muda sudah menjadi pecandu narkoba, maka masa depan bangsa akan suram.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana bagi penanam, penjual, maupun pemakai dengan ancaman pidana. Hal ini tampak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab XII, pasal 78 sampai 99.

- c. Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya yang sampai menimbulkan korban adalah karena pelanggaran terhadap lalu lintas. Ada yang tidak memakai helm, kecepatan yang terlalu tinggi, dan lain-lain. Semua ini merupakan bentuk pelanggaran yang dapat berakibat buruk bagi pengendara. Jika Undang-Undang yang sudah dibuat dipatuhi, maka akan tercipta suasana yang baik. Namun terkadang masih banyak yang melanggar undang-undang yang dibuat. Maka akibatnya adalah terjadi musibah yang tidak diinginkan.
- Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
- Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah. Peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).
- a. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
 - b. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kepentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.
 - c. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.
 - d. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus

untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

- i. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- j. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
- k. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

G. Metode Pembelajaran

1. Diskusi
2. Tanya jawab
3. Penugasan

H. Sumber, Alat dan Bahan Pembelajaran

1. Sumber Pembelajaran:
 - a. Buku Paket PKn
2. Alat dan Bahan Pembelajaran:
 - a. Kartu nama-nama peraturan
 - b. Gambar Rambu-rambu Lalu lintas

I. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (5 menit)
 - a. Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama, presensi, apersepsi dan kepercayaan masing-masing, untuk mengawali pelajaran.
 - b. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran
 - c. Guru dan siswa bertanya jawab tentang fungsi peta dunia.
2. Kegiatan Inti (90 menit)
 - a. Eksplorasi
Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang tata urutan perundang undangan yang berlaku di Indonesia
 - b. Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi:
 - 1) Guru menjelaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - 2) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar
 - 3) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok
 - 4) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:

- 1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
- 2) Bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman
- 3) Memberikan penguatan dan penyimpulan

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

Dalam kegiatan penutup, guru:

- a. Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
- b. Guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.
- c. Memberikan tes akhir

I. Penilaian**A. Prosedur Penilaian**

1. Penilaian Awal : -
2. Penilaian Proses : -
3. Penilaian Akhir : Ada

B. Teknik, Bentuk dan Instrumen

1. Teknik Penilaian
 - a. Penilaian Awal : Tanya jawab
 - b. Penilaian Proses : -
 - c. Penilaian Akhir : Tes tertulis
2. Bentuk Instrumen
 - a. Penilaian Awal : Tes lisan
 - b. Penilaian Proses : -
 - c. Penilaian Akhir : Tes tertulis

Bogor, 3 November 2018

Peneliti,

Guru Kelas V,

Eka Rizky Septiaji

Veri Frima Kuswaya, S.Pd.SD

NIM. H. 1410157

NUPTK.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Neneng Nengsih, M.Pd

NIP. 196904071992032005

SOAL EVALUASI

Nama :

Kelas :

1. Dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum karena Indonesia adalah negara
 - a. Hukum
 - b. Kesatuan
 - c. Agraris
 - d. Maritim
2. Memakai seragam sekolah secara lengkap termasuk...
 - a. Undang-Undang Sekolah
 - b. Tata Tertib Sekolah
 - c. Ketetapan Sekolah
 - d. Undang-Undang Dasar Sekolah
3. Peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga perlu untuk
 - a. Diperhatikan
 - b. Dilaksanakan
 - c. Dibaca
 - d. Didengarkan
4. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar
 - a. Berjalan dengan baik
 - b. Bisa dibaca
 - c. Bisa berbuat semaunya
 - d. Mau melanggar hukum
5. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah
 - a. Peraturan Pemerintah
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Keputusan Presiden
 - d. Ketetapan MPR
6. Seandainya peraturan itu sudah tidak lagi ditaati, maka yang terjadi adalah...
 - a. Kehidupan di masyarakat semakin tenteram
 - b. Masyarakat akan lebih aman
 - c. Kehidupan akan semakin lebih baik
 - d. Tatanan kehidupan menjadi kacau
7. Orang yang memperkaya diri dengan cara melanggar hukum disebut
 - a. Korupsi
 - b. Kolusi
 - c. Nepotisme
 - d. Teroris
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 adalah
 - a. Undang-Undang tentang Korupsi
 - b. Undang-Undang tentang
 - c. Undang-Undang tentang Lalu Lintas
 - d. Undang-Undang tentang Narkotika

Perlindungan Anak

9. Masyarakat yang berjasa dan berperan aktif dalam memberantas tindak korupsi akan mendapat
- a. Ancaman
b. Penghargaan
c. Cemoohan
d. Cacian
10. Bagaimana perasaanmu jika melihat anak seusia denganmu di perempatan jalan meminta-minta sambil menggendong adiknya?
- a. Salahnya sendiri tidak mau sekolah
b. Saya kasihan dan ingin dia sekolah
c. Biarkan saja, orang tuanya tidak bertanggung jawab
d. Saya jijik melihat anak yang minta-minta di perempatan

Penskoran dan Kunci Jawaban

A. Penskoran Pilihan Ganda

Nomor Soal	Jumlah skor jawaban yang benar
1.	10
2.	10
3.	10
4.	10
5.	10
6.	10
7.	10
8.	10
9.	10
10.	10
Jumlah	100

B. Kunci Jawaban

1. A
2. B
3. B
4. A
5. B
6. D
7. A
8. B
9. B
10. B

LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO.	Kegiatan	Terlaksana		Penilaian			
		Ya	Tidak	1	2	3	4
1.	Pendahuluan						
	Mengkondisikan kelas	√				√	
	Menyampaikan tujuan, model, metode pembelajaran	√				√	
2	Inti						
	Melakukan tanya jawab kepada peserta didik	√				√	
	Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	√					√
	Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok	√				√	
	Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual	√				√	
	Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa	√				√	
	Bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman	√					√
3	Penutup						
	Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar hari ini.	√				√	
	Mengakhiri pembelajaran dengan membaca do'a	√				√	
	Mengucapkan salam pada siswa	√				√	

Kriteria :

- 1 = tidak baik
- 2 = cukup baik
- 3 = baik
- 4 = sangat baik

Pengamat,

Veri Frima Kuswaya, S.Pd.SD

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riki Andriatna, M.Pd

Instansi : Universitas Djuanda Bogor

Jabatan : Dosen

Telah membaca instrument penelitian berupa angket yang digunakan dalam penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Pembelajaran *Word Square* Terhadap Pemahaman Materi Pkn Siswa Kelas V di SDN Cilember 01” oleh peneliti:

Nama : Eka Rizky Septiaji

NIM : H.1410157

Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan dalam pengumpulan data dilapangan.

Bogor, 2018

Riki Andriatna, M.Pd

Tabel
Kisi-kisi Instrumen Angket Kreativitas

Aspek	Indikator	Nomor Pernyataan		Jumlah
		Positif	Negatif	
Mengartikan	Menguraikan dengan kata-kata sendiri	1, 6	11	3
Memberikan contoh	Mampu memberikan contoh macam-macam	3, 12	14	3
Mengklasifikasi	Dapat menggambarkan kasus pelanggaran	5,8	13	3
Menyimpulkan	Menulis kesimpulan pendek dari suatu kejadian	7, 19	16	3
Menduga	Mampu mengambil kesimpulan dasar-dasar dari suatu kejadian	9, 10	18	3
Membandingkan	Membandingkan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	17	2, 21	3
Menjelaskan	Menjelaskan peraturan perundang-undangan	4, 15	20	3
Jumlah		13	8	21

INSTRUMEN SKALA PEMAHAMAN PESERTA DIDIK

NAMA :

KELAS :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan diri kamu, dan berilah tanda cklis (✓) pada kolom yang telah tersedia

Keterangan:

SL : Selalu

S : Sering

KK : Kadang-kadang

TP : Tidak Pernah

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SL	S	KK	TP
1	Untuk menambah pengetahuan tentang pengertian UUD 1945, Saya selalu membaca buku di perpustakaan				
2	Saya tidak dapat membandingkan antara peraturan pemerintah dengan peraturan daerah				
3	Saya dapat memberikan salah satu contoh dari tata urutan perundang-undang di Indonesia				
4	Saya dapat menjelaskan undang-undangan tentang korupsi				
5	Saya dapat memberikan contoh hukum bagi pelanggar undang-undang peraturan daerah				
6	Saya dapat menguraikan penjelasan peraturan daerah (perda) dengan menggunakan kata kata sendiri				
7	Saya dapat menyebutkan kejadian yang melanggar peraturan pemerintah				
8	Pada saat terjadi suatu peristiwa saya dapat menyimpulkan dari beberapa dugaan pelanggaran peraturan menurut undang-undang				

	perlindungan anak				
9	Pada saat terjadi suatu peristiwa saya dapat menyimpulkan dari beberapa dugaan pelanggaran peraturan menurut Perda kebersihan lingkungan				
10	Saya menguraikan pengertian undang-undang tingkat pusat dan daerah dengan menggunakan kalimat yang ada di buku				
11	Saya dapat memberikan contoh undang-undang tingkat pusat				
12	Jika guru meminta menyebutkan contoh pelanggaran korupsi, saya tidak bisa menjawabnya				
13	saya tidak dapat memberikan contoh perundang-undang tentang lalu lintas				
14	Saya dapat menjelaskan tujuan undang-undang lalu lintas				
15	Saya dapat membandingkan antara peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dengan peraturan pemerintah				
16	Pada saat terjadi suatu peristiwa pelanggaran tentang lalu lintas saya tidak dapat memberi suatu dugaan atau kesimpulan dasar				
17	Saya dapat menjelaskan pentingnya perundang-undangan dengan menggunakan kalimat yang ada di buku				
18	Saya tidak dapat membandingkan antara pelanggaran hukum lalu lintas dengan pelanggaran hukum angkutan jalan				

Tabel
Kisi-kisi Instrumen Angket Pemahaman

Aspek	Indikator	Nomor Pernyataan		Jumlah
		Positif	Negatif	
Mengartikan	Menguraikan dengan kata-kata sendiri	1, 6	10	3
Memberikan contoh	Mampu memberikan contoh macam-macam	3, 11	13	3
Mengklasifikasi	Dapat menggambarkan kasus pelanggaran	5,7	12	3
Menduga	Mampu mngambil kesimpulan dasar-dasar dari suatu kejadian	8, 9	16	3
Membandingkan	Membandingkan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	15	2, 18	3
Menjelaskan	Menjelaskan peraturan perundang-undangan	4, 14	17	3
Jumlah		11	7	18

**REKAPITULASI ANGKET PEMAHAMAN
KELAS EKSPERIMEN**

No. Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah
1	2	3	2	3	2	2	1	3	3	2	3	3	1	4	2	3	2	2	43
2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	4	1	4	4	4	47
3	1	4	2	2	4	3	2	3	4	4	1	3	2	4	2	2	1	2	46
4	2	4	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	4	3	1	3	2	3	44
5	2	4	2	3	2	2	1	3	3	2	3	2	1	4	3	1	2	3	43
6	2	4	1	2	4	2	2	1	2	4	2	4	4	1	1	3	1	4	44
7	2	4	2	1	2	2	2	2	3	4	1	4	4	2	4	3	1	4	47
8	2	3	3	3	2	2	1	3	3	2	3	3	1	3	2	3	2	2	43
9	2	4	1	2	1	1	1	1	2	1	1	3	4	1	1	4	4	4	34
10	2	4	2	1	1	1	1	1	2	2	1	3	3	1	2	4	3	3	37
11	2	3	3	3	2	1	1	2	4	2	2	3	4	2	1	3	2	4	44
12	3	3	2	2	2	3	1	2	4	4	1	2	2	2	1	3	3	3	43
13	2	3	2	2	4	3	2	4	4	4	2	4	2	2	2	3	1	3	49
14	1	3	4	1	1	2	1	4	2	4	1	4	4	4	1	3	1	4	45
15	2	4	2	2	2	3	2	3	2	2	1	4	3	3	1	4	4	3	47
16	1	3	2	1	1	1	1	4	4	2	1	3	1	1	2	4	3	3	38
17	4	1	3	1	2	4	1	2	1	4	3	3	3	4	3	3	1	4	47
18	2	4	2	2	2	3	2	2	1	4	2	3	4	3	2	2	1	3	44
19	2	3	4	2	1	3	1	4	3	2	1	3	4	1	2	3	3	4	46
20	1	4	4	1	4	3	1	2	4	3	4	4	1	1	4	4	2	1	48
21	1	4	2	1	4	2	1	1	1	3	3	4	3	1	1	3	3	4	42
22	3	4	2	1	1	2	1	1	3	2	3	4	1	3	2	4	4	1	42
23	3	4	4	1	2	2	1	2	2	3	3	4	2	1	1	2	2	2	41
24	2	4	4	2	1	2	1	2	4	4	2	3	4	4	2	3	1	3	48
25	2	3	3	3	2	2	3	4	4	2	3	2	3	3	3	3	2	3	50
26	1	3	2	3	2	1	1	3	3	3	2	3	3	2	1	4	3	4	44
27	3	4	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	2	2	4	2	46
28	2	4	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	1	3	2	3	46
29	4	4	3	3	2	2	3	3	4	2	3	2	3	3	1	3	2	1	48
30	3	4	2	2	2	1	2	1	3	1	2	2	4	2	1	3	3	4	42
31	2	4	2	2	2	1	3	2	1	3	2	4	1	2	3	3	4	4	45
32	2	4	2	2	2	3	2	2	4	4	2	1	3	2	1	4	1	4	45
33	3	4	2	2	2	2	3	1	2	2	3	4	1	4	2	3	3	4	47
34	1	4	4	1	4	3	1	3	1	3	4	4	1	2	3	3	1	4	47
35	3	4	2	2	1	2	1	1	3	2	1	2	3	1	2	3	4	2	39

36	3	4	2	1	2	1	2	2	1	1	2	4	4	2	1	4	3	4	43
37	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	1	3	2	3	2	3	50
38	3	4	2	2	2	3	3	1	4	2	3	4	1	3	3	1	2	2	45
39	3	4	2	2	2	2	3	1	2	2	3	4	1	4	2	3	3	4	47
40	3	4	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	2	2	4	3	47
41	2	4	3	2	1	1	3	2	1	3	3	3	3	3	1	3	3	2	43
42	2	4	3	3	1	1	1	2	4	2	4	3	4	1	1	4	3	3	46
43	3	4	2	1	1	2	1	1	3	2	3	4	3	2	2	4	4	3	45
44	3	4	1	4	1	2	1	2	2	4	3	3	2	2	1	2	2	3	42
45	2	3	1	2	2	2	3	2	2	4	2	4	3	1	2	3	3	3	44
46	3	2	2	2	2	2	3	3	4	3	2	1	1	2	3	3	2	2	42
47	2	2	2	2	3	3	4	3	2	2	3	3	4	1	1	2	3	3	45
48	2	3	3	4	2	3	1	4	4	3	2	3	1	3	3	4	4	2	51
49	2	2	1	1	1	3	3	4	4	4	2	3	3	2	1	4	2	2	44
jumlah																		2185	

**REKAPITULASI ANGKET PEMAHAMAN
KELAS KONTROL**

Nama Siswa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
1	2	4	3	2	2	3	4	4	2	2	3	3	1	2	2	4	2	3	48
2	2	4	2	2	2	1	3	2	1	3	1	3	2	1	1	4	3	1	38
3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	1	3	58
4	2	2	4	4	2	4	2	3	3	3	4	2	3	4	4	1	3	2	52
5	2	2	1	1	2	1	2	2	3	3	4	4	1	1	4	4	2	3	42
6	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	4	1	1	3	4	1	33
7	2	2	4	1	1	4	1	4	4	3	4	3	4	3	2	3	2	3	50
8	2	3	4	1	3	3	4	2	1	3	2	1	2	4	1	3	1	4	44
9	2	1	1	2	1	2	1	1	3	2	2	4	2	2	3	3	2	4	38
10	3	4	2	2	2	1	3	2	2	3	2	3	4	2	1	4	3	4	47
11	2	1	1	1	2	1	2	4	2	2	1	3	1	1	1	3	3	1	32
13	2	4	2	2	2	1	2	4	2	4	2	3	2	4	1	3	1	3	44
13	2	4	4	1	2	1	2	4	2	2	1	3	1	1	1	3	3	1	38
14	2	4	2	1	1	4	2	2	2	2	1	4	3	2	2	4	4	4	46
15	2	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3	1	1	4	1	4	40
16	2	4	2	2	1	3	2	2	4	4	4	4	3	2	1	4	1	4	49
17	4	4	3	4	1	2	3	3	4	4	2	4	1	3	4	2	3	4	55
18	2	4	2	3	4	2	4	3	1	2	4	4	4	2	1	3	2	4	51
19	2	2	4	4	2	4	1	4	2	3	4	1	3	3	1	1	3	1	45
20	2	3	4	3	2	1	4	1	2	1	2	3	1	4	1	4	3	2	43
21	2	4	4	2	2	4	3	1	2	2	4	4	3	2	4	3	1	3	50
22	3	1	2	1	3	2	3	2	3	2	2	4	2	2	3	3	2	4	44
23	3	2	1	2	4	3	2	3	4	2	3	2	4	4	1	3	2	1	46
24	3	3	3	2	2	3	2	4	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	51
25	3	4	2	2	2	1	1	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1	3	38
26	2	1	3	1	1	2	1	4	2	2	3	1	1	2	1	2	3	2	34
27	3	4	2	3	2	4	3	2	4	3	2	1	2	2	1	2	3	2	45
28	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2	3	1	1	2	1	2	3	4	34
29	3	4	2	2	2	4	1	1	4	3	2	1	4	3	2	4	1	4	47
30	2	4	4	1	2	2	3	2	3	4	4	4	4	4	3	4	1	4	55
31	2	2	1	1	2	1	2	4	3	3	2	4	1	2	3	4	2	2	41
32	2	4	4	1	2	2	4	2	4	4	4	4	3	3	1	1	2	2	49
33	2	2	4	1	2	4	2	2	2	2	4	3	3	3	2	3	2	3	46
34	3	4	1	1	4	2	3	2	1	2	2	4	1	3	2	4	3	2	44

35	3	3	1	4	2	1	1	2	4	4	3	3	1	2	2	4	1	4	45
36	3	4	1	2	2	3	1	3	1	1	2	1	3	3	1	2	4	4	41
37	3	3	1	4	2	3	3	1	3	3	4	4	3	3	2	4	3	2	51
37	3	3	1	4	2	3	3	1	3	2	4	4	2	2	1	3	1	2	44
39	2	2	2	3	4	3	2	2	4	3	2	3	2	2	3	3	1	2	45
40	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	2	2	2	1	4	2	1	44
41	3	2	3	1	4	2	3	4	2	3	4	1	2	3	3	3	2	4	49
42	1	3	4	2	3	2	4	2	4	1	4	2	4	4	2	4	5	2	53
43	2	3	4	2	3	4	1	3	2	1	1	1	2	3	4	2	4	4	46
44	1	4	2	3	1	3	2	4	2	4	4	2	1	1	3	4	2	2	45
45	2	4	1	3	2	2	3	1	1	4	3	2	4	4	4	3	2	1	46
Jumlah																		2026	
h																		88,0869	
																		6	

Tests of Normality^a

	Kolmogorov-Smirnov ^b			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
skor_Eksperimen	.114	50	.105	.949	50	.031

a. kelas_Eksperimen is constant. It has been omitted.

b. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality^a

	Kolmogorov-Smirnov ^b			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
skor_kontrol	.142	45	.023	.975	45	.438

a. kelas_kontrol is constant. It has been omitted.

b. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variances

kelas

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.376	13	73	.010

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
								Lower	Upper	
Skor	Equal variances assumed	9.885	.002	-.458-	93	,648	-.442-	,966	-2,361-	1,4477
	Equal variances not assumed			-.445-	66,869	,658	-.442-	,994	-2,427-	1,542

Tabel

No.	Pertanyaan Terhadap Guru	Jawaban Guru
1.	Bagaimana Pembelajaran PKN dikelas V?	Tergantung materi pelajaran yang sedang dipelajari. Karena ternyata mata pelajaran PKN itu bisa kita pelajari kewat kehidupan sehari-hari.
2.	Apa saja metode dan model pembelajaran yang biasa digunakan pada mata pelajaran PKN?	Yang biasa digunakan metode ceramah, selebihnya menyesuaikan dengan mata pelajaran itu sendiri.
3.	Apakah sudah pernah menggunakan model pembelajaran word square?	belum, karena lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
4.	Bagaimana tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran PKN?	Tingkat pemahaman siswa dapat dikatakan kurang karena siswa merasa jenuh dengan metode pembelajaran yang digunakan
5.	Apa saja materi PKN yang	Materi yang diajarkan: Pentingnya

Pedoman Wawancara Terhadap Guru

	diajarkan untuk semester ganjil?	keutuhan negara kesatuan republik indonesia (NKRI), peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.
6.	Bagaimana antusias peserta didik dalam mata pelajaran PKN?	Tergantung materi yang sedang dipelajari.
7.	Bagaimana karakteristik peserta didik dikelas V?	Karakteristik peserta didik beragam dari tingkat sosial ekonomi, lebih dominan mencari pelajaran lewat internet. Tingkat kecerdasan juga beragam.

DOKUMENTASI



Foto 1: Tempat Penelitian

KELOMPOK EKSPERIMEN

Foto 2: Proses Pembelajaran



Foto 4: Diskusi Kelompok



Foto 3: Diskusi Kelompok



Foto 5: Pengisian Skala Pemahaman



Foto 6 : Pentsentasi hasil Diskusi



Foto 6 : Pentsentasi hasil Diskusi

KELOMPOK KONTROL



Foto 7: Proses Pembelajaran



Foto 11: Proses Pembelajaran



Foto 8: Proses Pengisian Skala Pemahaman



Foto 10: Proses Pengisian Skala Pemahaman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pria yang lahir di Bogor pada tanggal 20 September 1996, memiliki nama Eka Rizky Septiaji merupakan anak sulung dari pasangan bapak Tarmuji dan ibu Esih Kurniati. Bertempat tinggal di Jalan Raya Puncak Gang Hotel Bali Nomor 26 RT. 04 RW. 01 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, 16750. Telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Leuwimalang pada tahun 2002-2008, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah

Pertama di SMP Amaliah pada tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMK Amaliah 1&2 Ciawi Bogor pada tahun 2011-2014. Ketika di bangku sekolah menengah, ia aktif di organisasi ekstrakurikuler futsal. Melanjutkan ke jenjang S1 di Universitas Djuanda Bogor, mengambil jurusan PGSD pada tahun 2014 sampai sekarang.